

ABSTRAK

Nama: Mohammad Ilham Nurrochman, Judul: Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Wanita ASN Yang Dipoligami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pembimbing: H. Abd. Wahed, M.HI., tahun: 2020.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Wanita ASN, Poligami, PP No. 45 Tahun 1990.

PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan wanita ASN menjadi isteri poligami karena menurut tujuan PP ini agar wanita yang bekerja sebagai ASN tidak lalai dalam menjalankan tugasnya selain itu ASN sebagai contoh suritauladan terhadap masyarakat. Dalam PP No. 45 Tahun 1990 bahwasannya pada pasal 4 ayat 2 seakan-akan adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan terhadap wanita, dimana peraturan ini lebih memihak kepada laki-laki dalam izin perkawinan poligami ASN.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana pengaturan Wanita ASN yang dipoligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Kedua, bagaimana analisis kesetaraan gender terhadap wanita Aparatur Sipil Negara yang dipoligami dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris, sumberdata diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi informannya adalah beberapa aktivis gender, sedangkan analisisnya menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan keabsahan data berupa, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan uraian rinci.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama* pengaturan tentang larangan bagi wanita ASN untuk menjadi isteri poligami tertera pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi: “Wanita ASN tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. *Kedua*, jika dilanalisis dari kesetaraan gender, pemberlakuan larangan bagi wanita ASN menjadi isteri poligami tidak memenuhi kriteria kesetaraan gender dengan alasan: tidak adanya kesempatan yang sama antara ASN laki-laki dengan perempuan, mengandung deskriminasi terhadap wanita, merampas hak wanita dalam hal perkawinan dan pekerjaan, serta adanya potensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.

ABSTRACT

Name: Mohammad Ilham Nurrochman, Title: Analysis of Gender Equality Against Polygamous ASN Women in Government Regulation Number 45 of 1990 Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983, Supervisor: H. Abd. Wahed, M.HI., year: 2020.

Keywords: Gender Equality, ASN Women, Polygamy, PP No. 45 of 1990.

PP Number 45 of 1990 Article 4 paragraph (2) concerning the prohibition of ASN women from being polygamous wives because according to the purpose of this PP so that women who work as ASNs are not negligent in carrying out their duties other than ASN as role models for society In PP No. 45 of 1990 that in article 4 paragraph 2 it seems as if there is discrimination or inequality against women, where this regulation is more in favor of men in ASN polygamous marriage permits.

Based on this, there are two problems that become the main study in this study, namely: first, how is the regulation of ASN women who are polygamous in PP No. 45 of 1990 on Government Regulation Number 10 of 1983. Second, how is the analysis of gender equality against women in State Civil Apparatus who are polygamous in Government Regulation no. 45 of 1990 amendments to Government Regulation no. 10 of 1983.

This study uses a qualitative approach, with the type of empirical legal research, data sources obtained by interviewing and documenting the informants are several gender activists, while the analysis uses reduction, data presentation, and drawing conclusions, and the validity of the data in the form of participation extension, persistence of observation, and description. detail.

The results of this study are, firstly, the regulation regarding the prohibition for ASN women to become polygamous wives is stated in Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 which reads: "ASN women are not allowed to be second/third/fourth wives. Second, if it is analyzed from gender equality, the prohibition for female ASN to be polygamous wives does not meet the criteria for gender equality on the grounds: there is no equal opportunity between male and female ASN, contains discrimination against women, deprives women of their rights in terms of marriage and work. , as well as the potential for negative impacts in the future.